

**PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

FEBRI HARAHAHAP

188520015



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/11/22

**PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area

Oleh :

FEBRI HARAHAAP

188520015

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/11/22

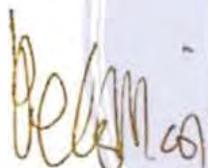
Judul Skripsi : Peranan Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Disabilitas Di Kota Medan

Nama : Febri Harahap

NPM : 188520015

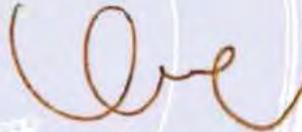
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing



Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

Pembimbing I



Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP

Pembimbing II



Dr. Anwarul Huda Juliana Hasibuan, MSi

Dekan



Khairunnisa Lubis, S.Sos, M.Ipol

Ka. Prodi

Tanggal Lulus :

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 15 Agustus 2022



Febri Harahap

188520015

 Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/11/22

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri Harahap
NPM : 188520015
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

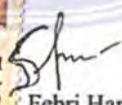
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Peranan Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas di Kota Medan”**. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 15 Agustus 2022

Yang menyatakan




Febri Harahap

188520015

 Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

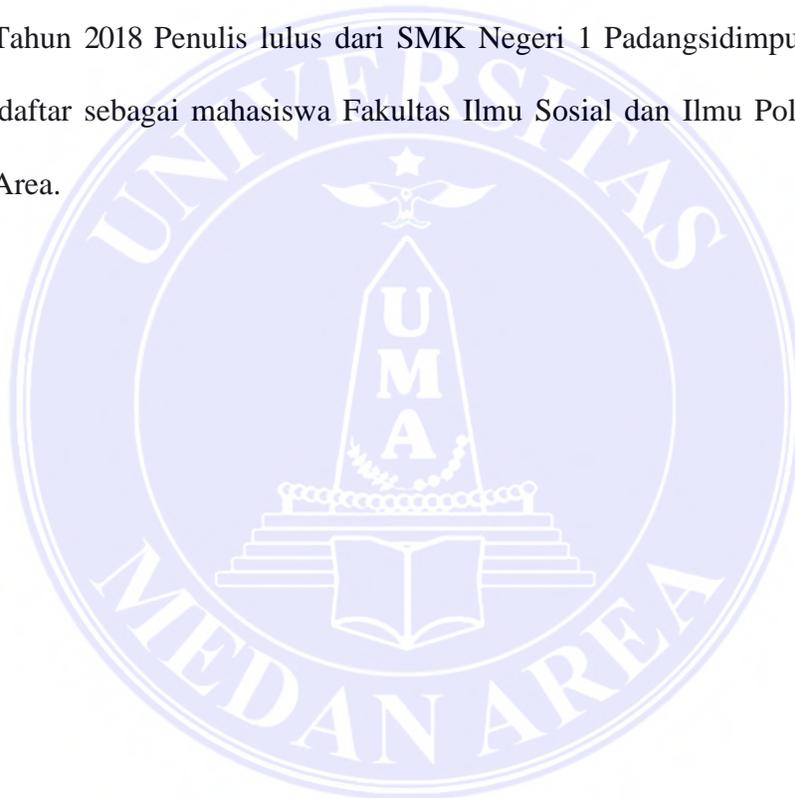
Document Accepted 21/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/11/22

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Febri Harahap, anak dari Bapak Alm.Hoirun Harahap dan Ibu Nurmian Siregar , lahir di Balimbing Jae pada 07 Februari 2000. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara.

Tahun 2018 Penulis lulus dari SMK Negeri 1 Padangsidimpuan, pada tahun 2018 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



ABSTRAK

Fenomena pada penelitian ini ada dua, yaitu kuota bantuan sosial yang tidak menyeluruh, minimnya dana bantuan seperti alat bantu dan uang tunai terhadap penyandang disabilitas, penelitian ini bertujuan untuk meratakan bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas di Kota Medan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori peran oleh Sihombing dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan peranan Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kota Medan cukup baik dapat dibuktikan sebagai berikut: Pertama, Peran Dinas Sosial sebagai fasilitator cukup baik, karena Dinas Sosial memfasilitasi alat bantu dan menerima pengajuan dari setiap penyandang disabilitas yang ingin dibantu, namun masih ada keluhan mengenai penggantian alat bantu yang sudah rusak. Kedua, Peran Dinas Sosial sebagai pelayan masyarakat sudah baik, karena dalam pelayanannya Dinas Sosial selalu mengutamakan kepentingan penyandang disabilitas. Ketiga, Peran Dinas Sosial sebagai pendamping sudah baik, karena penyaluran bantuan sudah tepat waktu, Keempat, Peran Dinas Sosial sebagai mitra sudah bekerja dengan baik, karena Dinas Sosial sudah mampu meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Kelima, Peran Dinas Sosial sebagai penyandang dana sudah baik, karena dana sudah tersalurkan dengan baik, namun ada kendala yaitu minimnya bantuan dana dari Kementerian pusat. Faktor pendukung yaitu: pengajuan bantuan gratis dan pegawai ramah sedangkan faktor penghambat yaitu: banyak usulan masyarakat yang belum tercover dan anggaran yang diterima dari pusat tidak mencukupi.

Kata kunci: Peranan, Kesejahteraan Sosial, Penyandang Disabilitas.

ABSTRACT

There are two phenomena in this study, namely the quota of social assistance that is not comprehensive, the lack of assistance funds such as aids and cash for persons with disabilities, this study aims to distribute social assistance to persons with disabilities in the city of Medan. In this study, the researcher used the role theory by Sihombing with the type of qualitative descriptive research with data collection techniques, namely, interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the role of the Social Service in improving the social welfare of persons with disabilities in Medan City is quite good, which can be proven as follows: First, the role of the Social Service as a facilitator is quite good, because the Social Service facilitates tools and accepts applications from every person with a disability who wants to be assisted. , but there are still complaints about replacing damaged tools. Second, the role of the Social Service as a public servant is good, because in its services the Social Service always prioritizes the interests of persons with disabilities. Third, the role of the Social Service as a companion is good, because the distribution of aid is timely. Fourth, the role of the Social Service as a partner has worked well, because the Social Service has been able to improve welfare and meet the needs of persons with disabilities. Fifth, the role of the Social Service as a funder is good, because the funds have been channeled properly, but there are obstacles, namely the lack of financial assistance from the central Ministry. The supporting factors are: the application of free assistance and friendly staff, while the inhibiting factors are: many community proposals have not been covered and the budget received from the center is not sufficient.

Keywords: Role, Social Welfare, Persons with Disabilities.

KATA PENGANTAR

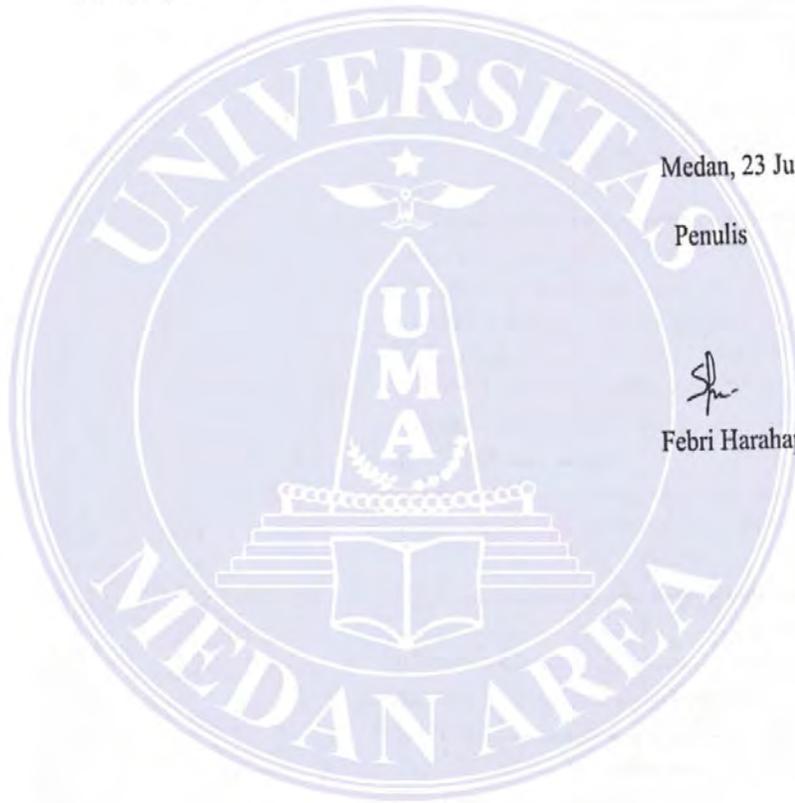
Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun judul skripsi penelitian ini adalah **“Peranan Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Di Kota Medan”**.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang membantu. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dadan Ramdan M.Eng,M.Sc selaku rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr Effiati Hasibuan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
3. Ibu Khairunnisa Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing 1 Penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Zoraya Alfathin Rangkuti, S.Sos, M.PA selaku Sekretaris penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran arahan dalam penyusunan skripsi ini ini.
7. Bapak Nasrullah Hidayat, S.Pd, M.Sc, selaku ketua Program Studi Ilmu administrasi Publik Universitas Medan area.
8. Yang tersayang dan teristimewa Kedua orang tua saya, Alm. Hoirun Harahap dan Nurmian Siregar, kakak dan abang saya, Syamsiah Harahap, Rayani Harahap, dan Rajali Harahap. yang telah memberikan semangat dan motivasi, membiayai serta memberikan doa yang tiada henti demi keberhasilan dan masa depan penulis.
9. Bapak dan ibu dosen di Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi selama proses belajar mengajar dalam materi perkuliahan. Serta staff dan pegawai Universitas Medan area yang telah memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada Bapak Fahrul Rozi Pane, S.Sos, M.H selaku kepala bidang Rehabsos, beserta pegawai Kantor Dinas Sosial lainnya, yang telah memberikan informasi yang saya butuhkan selama riset di Dinas Sosial Kota Medan.
11. Kepada sahabat-sahabat saya, Riska Fitriani Siregar, Mellynita Sirongo-ringo, Marcelania br Purba, Icha Novita Hutauruk, Agnes Carolina Sinaga, Dian Sitanggung, Afni, Nurmalinda, Febby Yolanda Putri dan teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Mengingat keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki, peneliti menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya.



Medan, 23 Juni 2022

Penulis

Febri Harahap

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Pengertian Peranan	8
2.1.2 Macam – macam Peran	9
2.1.3 Dinas Sosial	11
2.1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Dinas Sosial	11
2.1.5 Kesejahteraan Sosial	13
2.1.6 Penyandang Disabilitas	15
2.2 Penelitian Relevan	20
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.2.1 Tempat Penelitian	26
3.2.2 Waktu Penelitian	26
3.3 Informan Penelitian.....	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.5 Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV PEMBAHASAN.....	29
4.1 Hasil	29
4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	29
4.1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan...	32
4.1.3 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Medan	33
4.1.4 Struktur Organisasi	33
4.2 Pembahasan.....	45
4.2.1 Peranan Dinas Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas di Kota Medan.....	45
4.2.1.1 Peran Sebagai Fasilitator.....	49
4.2.1.2 Peran Sebagai Pelayanan Masyarakat.....	51
4.2.1.3 Peran Sebagai Pendamping.....	54

4.2.1.4 Peran Sebagai Mitra.....	56
4.2.1.5 Peran Sebagai Penyandang Dana.....	57
4.2.1.6 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung.....	59
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	69



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Medan.....	4
Tabel 2.1 Istilah Penyandang Disabilitas.....	19
Tabel 2.2 Penelitian Relevan.....	20
Tabel 3.1 Jadwal dan Waktu Penelitian.....	25
Tabel 4.2 Nama Pegawai Dinas Sosial Kota Medan.....	43
Tabel 4.3 Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Medan.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir.....	23
Gambar 4.1 Dinas Sosial Kota Medan.....	29
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan.....	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga tidak satupun manusia yang mendapat perlakuan tidak adil. Hal ini telah dirumuskan dalam UUD 1945 yang telah menjamin hak dan kewajiban dari setiap warga negaranya sehingga harapannya tidak terjadi diskriminasi ataupun perlakuan yang merendahkan martabat manusia tidak seharusnya terjadi.

Penyandang disabilitas adalah orang dengan keterbatasan fisik. Pada Tahun 2016 Undang-undang Nomor 8 tentang Penyandang Disabilitas , penyandang disabilitas dapat dipahami sebagai : “ Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Penyandang disabilitas adalah mereka yang cenderung mengalami hambatan partisipasi penuh dalam masyarakat karena adanya keterbatasan yang mereka miliki. Oleh karena itu penyandang disabilitas perlu diperlakukan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Salah satu yang tanda perhatian dari pemerintah adalah adanya Konvensi Internasional hak-hak Penyandang Disabilitas yang terbentuk berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana telah dinyatakan dalam prinsip-prinsip piagam PBB yang

mengakui martabat dan harkat yang melekat dan hak-hak setara dan tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia sebagai dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas atau *The Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* mengamanatkan bahwa kewajiban Negara Indonesia sebagai Negara yang menandatangani konvensi melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan.

Situasi yang dihadapi penyandang disabilitas disebabkan oleh dua faktor utama yaitu : Pertama, cacat didapat (*acquired*), penyebabnya bisa berupa kecelakaan atau perselisihan, maupun karena penyakit kronis. Kedua, cacat sejak lahir, penyebabnya dapat berupa kelainan pembentukan organoran (*organogenesis*) pada masa kehamilan, serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau karena penyakit menular seksual (Nugroho dan Utami, 2008 : 114). Penyandang disabilitas jugaterdiri dari beberapa jenis, yaitu ; tunagrahita, tunalaras, tunadaksa, tunanetra, tuna rungu, tunawicara, serta tunaganda (Saputro dkk, 2015 : 6).

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia cukup banyak sehingga keberadaan mereka tidak dapat diabaikan begitu saja. Beberapa jenis penyandang disabilitas yaitu, disabilitas sensorik, disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental dan disabilitas ganda.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 adalah, 14,2 persen penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas atau 30,38 juta jiwa. Pada Tahun 2019 Survei Sosial Ekonomi Nasional jumlah penyandang disabilitas di

Indonesia berjumlah sebesar 9,7 persen dari jumlah penduduk, atau sekitar 26 juta orang. Pada Tahun 2020 berdasarkan Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta atau sekitar 5 persen. Demikian pula di Kementerian Sosial ada data terpadu kesejahteraan sosial pada Januari 2020 bisa menggambarkan status sosial ekonomi yang intinya diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi, kerentanan, dan masalah kesejahteraan. Data lain yang menunjukkan gambaran masyarakat di Indonesia adalah Sistem Informasi Penyandang Disabilitas. Sistem ini berupa sistem pengelolaan data penyandang disabilitas pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang mengenali keragaman dan kebutuhan penyandang disabilitas. Sistem ini dibuat berdasarkan amanah Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dari data sistem penyandang disabilitas pada Maret 2020 ada 197,582 jiwa penyandang disabilitas.

Dinas sosial merupakan suatu lembaga yang memiliki misi untuk melaksanakan dinas yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah didasarkan pada prinsip otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial. Dinas sosial sebagai dinas yang menaungi masalah sosial harus mampu berperan secara maksimal untuk mensejahterakan para penyandang disabilitas terutama yang sudah memasuki tahap produktif dalam hidupnya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dari penyandang disabilitas dinas sosial adalah dengan cara mendayagunakan untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki melalui pembinaan, dan pelatihan yang intensif, sehingga mereka

nantinya mempunyai bekal untuk hidup dengan mandiri tanpa bergantung pada orang lain.

Program yang diterapkan untuk membantu para penyandang disabilitas khususnya bagi penyandang disabilitas berat yang tidak dapat melakukan kegiatan apapun tanpa bantuan dari pihak ketiga adalah Program Asistensi SOSIAL bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) merupakan bentuk pertanggung jawaban negara dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berat dan perwujudan dari perlindungan sosial pemerintah terhadap warganya.. Mereka tidak mampu dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap baik dari mereka sendiri maupun dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pemko Medan melalui Dinas Sosial Kota Medan juga memberikan bantuan untuk penyandang disabilitas berupa alat bantu penyaluran bantuan ini merupakan program Pemko Medan atas kepeduliannya terhadap penyandang disabilitas.

Di Kota Medan sendiri jumlah Penyandang Disabilitas cukup banyak, akan tetapi kuota bantuan tidak sesuai dengan penyandang disabilitas yang ada di Kota Medan. Dinas Sosial sendiri menangani penyandang disabilitas dengan pendampingan pemberian bantuan yaitu dengan cara pendampingan, untuk bantuan seperti dana itu diberikan oleh pemerintah pusat yaitu Kementrian Sosial, hanya saja dinas sosial lah yang merekomendasikan bantuan tersebut.

”Pemberian bantuan tersebut langsung dikirim ke rekening masing-masing penerima manfaat (penyandang disabilitas). Untuk pendampingan 24 Kecamatan di Kota Medan ada 8 orang pendamping disabilitas di Kota Medan. Jadi hampir 1 pendamping yang mendampingi 2 atau 3 Kecamatan. Dalam beberapa tahun belakangan ini Kementrian Sosial Pemerintah Kota Medan memberikan bantuan berupa alat bantu seperti kursi roda, tongkat, alat bantu pendengar dan berbagai macam lainnya. Permasalahan yang sering

terjadi pada Penyandang Disabilitas itu sendiri adalah sarana dan prasarana yang kurang ramah bagi penyandang disabilitas tersebut”.

Jumlah penyandang disabilitas di Kota Medan sendiri ada 379 jiwa, mulai dari tahun terakhir yaitu 2019-2021 berikut Jumlah Penyandang Disabilitas dengan beberapa jenisnya :

Tabel 1.1 Jumlah Penyandang Disabilitas Di Kota Medan

No	Jenis Penyandang Disabilitas	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Tuna Netra	60	51	50
2.	Tuna Rungu	20	13	12
3.	Tuna Daksa	18	12	12
4.	Tuna Grahita	22	20	18
5.	Tuna Wicara	15	5	7
6.	Autis	10	6	3
7.	Mental	15	6	4

Sumber : Dinas Sosial Kota Medan Tahun 2022

Kuota bantuan terhadap penyandang disabilitas itu sendiri tidaklah begitu banyak dan itu tergantung dari kementerian itu sendiri, jadi penyandang disabilitas datang langsung ke Dinas Sosial dengan syarat menyerahkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Nomor *Handphone*. Setelah itu pendamping tersebut akan menyurvei atau cek lokasi untuk mengetahui apakah penyandang disabilitas tersebut layak untuk menerima bantuan. Karena pemberian bantuan ini harus sesuai sasaran, dalam arti pemberian bantuan ini tidak bisa dilakukan sembarangan.

Bantuan dana berjumlah sangat minim. Dan bantuan alat penyandang disabilitas tersebut juga tidaklah banyak penyandang disabilitas dan jumlah tersebut tidaklah sesuai dengan jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kota Medan. Jadi bentuk pemberian bantuan terhadap penyandang disabilitas Kota Medan ada dua

yaitu: asistensi dari Kementerian Sosial dan dari Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sosial seperti alat bantu tersebut.

Ruang lingkup dari perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas meliputi:

1. Kesaamaan kesempatan
2. Aksebilitas
3. Rehabilitasi
4. Bantuan sosial

Dengan penjelasan diatas, harapan bahwa dinas sosial mampu dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas di kota medan dengan upaya-upaya yang mampu mensejahterakan dan meratakan bantuan penyandang disabilitas tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik dalam mengambil judul tugas skripsi yaitu “ **Peranan Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas di Kota Medan**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertuang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kota Medan ?
2. Apakah faktor penghambat dan pendukung Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kota Medan ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kota Medan
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kota Medan

1.4. Manfaat penelitian

1. Bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan penulis dalam menggunakan ilmu dan teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dengan membandingkannya dengan fakta dilapangan
2. Bagi Akademis, penelitian diharapkan bermanfaat untuk pihak-pihak yang memiliki kompeten dalam mencari informasi serta menambah wawasan untuk bahan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang sejenis
3. Bagi Instansi, penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang sosial

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Peranan dan Peran

sering kita mendengar tentang kata peran atau peranan dalam kehidupan sehari-hari, namun belum tentu semua orang mengerti arti kata tersebut. Peranan itu sendiri berasal dari kata “peran”. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007 : 845). Poerwadarminta mengemukakan bahwa (1995 :751) “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: “Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”. Bryant dan White dalam Amira (2012:9) menyatakan bahwa peran didefinisikan sebagai suatu deskripsi “ pekerjaan untuk seseorang atau individu yang mengandung harapan-harapan tertentu yang tidak mempedulikan siapa yang menduduki suatu posisi tersebut”. Dari pengertian di atas dapat diambil pengertian bahwa peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kedudukan (status) sebagai bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan.

sedangkan Soerjono Soekanto (1987:221) mengemukakan defenisi peranan lebih banyak menunjukkan fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta dalam menjalankan suatu peranan.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mampuanyai lingkungan, yang setiap diperlukan untuk berinteraksi. (Miftah Thoha, 2012:10).

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , (tahun 1994, hlm. 1173) peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.

Menurut Mayor Polak Peranan memiliki dua arti, yaitu sebagai berikut:

1. Dari sudut individu berarti sejumlah peranan yang timbul dari berbagai pola yang didalamnya individu tersebut ikut aktif
2. Peranan secara umum menunjuk pada keseluruhan peranan itu dan menentukan apa yang dikerjakan seseorang untuk masyarakatnya, serta apa yang dapat diharapkan dari masyarakat itu

Peranan lebih menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Peranan tersebut mencakup pada tiga hal sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
2. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
3. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peranan juga dapat dikatakan sebagai struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2012: 212-213)

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan Peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Peranan yang diharapkan (*expected roles*), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.
2. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*). Yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Menurut Sihombing (2001 : 172) ada beberapa kriteria peran yang diharapkan dapat dilaksanakan yaitu:

1. Sebagai Fasilitator

Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mencapai tanpa mengambil posisi tertentu dalam berdiskusi serta dapat memecahkan masalah secara bersama-sama dan fasilitator bukanlah seseorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan, nasehat atau pendapat. Fasilitator juga bisa menjadi pengarah yang baik untuk permasalahan. Sedangkan fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan pekerjaan serta memperlancar pelaksanaan dengan suatu usaha tertentu. Fasilitas ialah suatu bantuan yang berupa uang atau benda dalam mempermudah suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.

2. Sebagai pelayan masyarakat

Melayani masyarakat merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal.

3. Sebagai pendamping

Sebagai pendamping mereka yang telah dilatih untuk dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat dalam memerankan diri sebagai masyarakat. Acuan kerja yang diterapkannya adalah Tutwuri Handayani (mengikuti dari belakang, tetapi memberikan peringatan bila akan

terjadi



penyimpangan). Sebagai pendamping tentu memiliki peran yang sangat menentukan keberhasilan program-program yang dijalankannya.

4. Sebagai Mitra

Konsep pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, maka masyarakat harus dianggap sebagai mitra.

5. Sebagai penyandang dana

Sebagai penyandang dana, Dinas sosial memberikan bantuan baik material maupun non material.

2.1.2 Macam-macam peran

Tugas utama dari seorang pengembang masyarakat adalah untuk mengembangkan kapasitas pelaku masyarakat agar mampu mengorganisir dan menentukan secara mandiri terhadap upaya-upaya yang diperlukan dalam kehidupan yang dijalannya. Seorang pengembang masyarakat memiliki beberapa peran yang harus dimainkan dalam melakukan pengembangan terhadap suatu masyarakat, berikut beberapa peran yang dimaksud yaitu:

A. Mengorganisasi

Menurut *Jim Ife* dan *Frank Tesoriero* mengemukakan bahwa salah satu peran dalam pemberdayaan adalah dengan mengorganisasi yaitu peran yang harus dimainkan oleh pekerja sosial untuk melibatkan kemampuan berfikir dari masyarakat secara bersama-sama dalam hal melakukan pembangunan.

B. Fasilitator

Fasilitator yaitu peran-peran yang dilakukan seorang pengembang masyarakat dengan cara memberikan stimulant dan dukungan untuk masyarakat.

C. Pendidikan

Pendidikan adalah peran-peran kependidikan untuk masyarakat. Dalam pengembangan masyarakat terjadi proses pembelajaran secara terus-menerus dari masyarakat maupun pekerja kemasyarakatan untuk terus meningkatkan keterampilan dan pola pikir masyarakat agar dapat berkembang dan menjadi lebih baik.

D. Keterampilan teknik

Keterampilan teknik adalah pengembangan masyarakat dalam menerapkan suatu keterampilan teknik untuk mengembangkan masyarakat.

E. Perwakilan

Perwakilan adalah peran yang dilakukan oleh seorang pengembang masyarakat di dalam interaksinya dengan lembaga luar atas nama Masyarakat dan demi kepentingan masyarakat.

2.1.3 Dinas Sosial

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang sosial yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah. Dinas sosial Kota Medan didirikan berdasarkan peraturan Walikota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja perangkat daerah.

Dinas Sosial Kota Medan sebagai salah satu perangkat organisasi wilayah Kota Medan yang melaksanakan kewenangan pemerintahan dibidang sosial. Sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Sosial yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial, Dinas Sosial juga melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program dan kegiatan terkait dengan urusan di bidang sosial Kota Medan.

2.1.4 Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya. *James dan Medgley* (dalam Huda, 2013) membuat tiga ukuran suatu kondisi bisa disebut sejahtera yaitu ketika masalah sosial dapat dikelola dengan baik, saat kebutuhan-kebutuhan tercukupi, dan tatkala peluang-peluang sosial dalam masyarakat terbuka secara lebar.

Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang ditujukan untuk membantu I individu dan

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diadakan baik oleh lembaga-lembaga negara maupun swasta yang bertujuan untuk, mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap penyelesaian masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial di Negara-negara maju, disebut dengan jaminan sosial (*social security*), seperti bantuan sosial (*social assistance*) yang diselenggarakan oleh Negara terutama untuk kaum yang kurang beruntung. Sedangkan di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia.

Akan tetapi dalam konteks yang sangat luas kesejahteraan sosial banyak diinterpretasikan bermacam-macam arti dan makna. Pemaknaan yang luas tentang kesejahteraan sosial tidak dapat disalahkan karena pembahasan kesejahteraan sosial memiliki berbagai ruang lingkup, mulai dari kesejahteraan sosial bermakna “kondisi” menurut UU No 6 Tahun 1974 yang berisi tentang pokok-pokok kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial sebagai “system informasi” yang terimplementasi dalam bentuk system organisasi pelayanan kemanusiaan seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), panti-panti sosial dan lain-lain.

2.1.5 Penyandang Disabilitas

1. Defenisi penyandang cacat

Kata “cacat” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti yaitu:

- a. Kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada benda, badan, batin atau akhlak).
- b. Lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna).
- c. Cela atau aib.
- d. Tidak atau kurang sempurna

Dari berbagai pengertian ini tampak jelas bahwa istilah “cacat” memiliki konotasi yang negatif, peyoratif, dan tidak bersahabat terhadap mereka yang memiliki kelainan. Persepsi yang muncul dari istilah “penyandang cacat” adalah kelompok sosial ini merupakan kelompok yang serba kekurangan, tidak mampu, perlu dikasihani, dan kurang bermartabat. Persepsi seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan konvensi internasional yang mempromosikan penghormatan atas martabat “penyandang cacat” dan melindungi dan menjamin kesamaan hak asasi mereka sebagai manusia.

Undang-undang RI No 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, pasal 1 ayat 1, mendefenisikan “penyandang cacat” sebagai “setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya”.

1. Defenisi orang berkebutuhan khusus (Disabilitas)

Istilah “orang berkebutuhan khusus” (*person with special needs*) memiliki pengertian yang sangat luas dan pertama kali dicantumkan dalam dokumen kebijakan internasional dalam pernyataan *Salamanca* dan kerangka aksi mengenai pendidikan berkebutuhan khusus. Bahwa kebutuhan khusus itu meliputi anak penyandang cacat, anak berbakat, anak jalanan, anak dari penduduk terpencil ataupun pengembara, anak dari kelompok linguistik, etnik maupun kebudayaan minoritas, serta anak dari daerah kelompok lain yang tidak beruntung.

Pernyataan ini menunjukkan dengan jelas bahwa kecacatan hanyalah merupakan salah satu dari banyak penyebab kebutuhan khusus. Penyandang ini dalam usia sekolah disebut Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dari anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi ataupun fisik. Didalamnya termasuk :

- a. Tunanetra
- b. Tunarungu
- c. Tunadaksa
- d. Tunagrahita
- e. Tunalaras
- f. Kesulitan belajar
- g. Gangguan prilaku
- h. Anak berbakat dan

i. Anak dengan gangguan kesehatan.

2. Defenisi Penyandang Ketunaan

Secara kebahasaan, tuna adalah kata sifat (*adjective*) dan kata bendanya adalah ketunaan, yang secara harfiah berarti kerugian atau kerusakan. Paralel dengan kata “tuna” yang digunakan untuk memperhalus kata “kecacatan”. Oleh karena itu, istilah “penyandang ketunaan” *cukuo realistic*. Karena tetap menggambarkan keadaan yang sesungguhnya (kerusakan, kekurangan, dan kerugian sebagaimana arti hakikat harfiah kata tuna itu).

Penggunaan istilah tuna ini pada awalnya dimaksudkan untuk memperhalus kata cacat demi tetap menghormati martabat penyandanganya, tetapi dalam perkembangan selanjutnya kata tuna juga digunakan untuk membentuk istilah yang mengacu pada kekurangan non-organik, misalnya :

- a. Tunawisma
- b. Tunasusila
- c. Tunalaras

3. Defenisi Penyandang Disabilitas

Dalam upaya mencari istilah sebagai pengganti terminologi “penyandang cacat” maka berdasarkan saran dari pusat bahasa yang menetapkan bahwa kriteria peristilahan yang baik adalah frase yang terdiri dari dua kata, maka istilah “orang dengan Disabilitas” dipadatkan menjadi “Penyandang Disabilitas”. Akhirnya, istilah “penyandang disabilitas” inilah yang disepakati untuk digunakan sebagai pengganti istilah “penyandang cacat”.

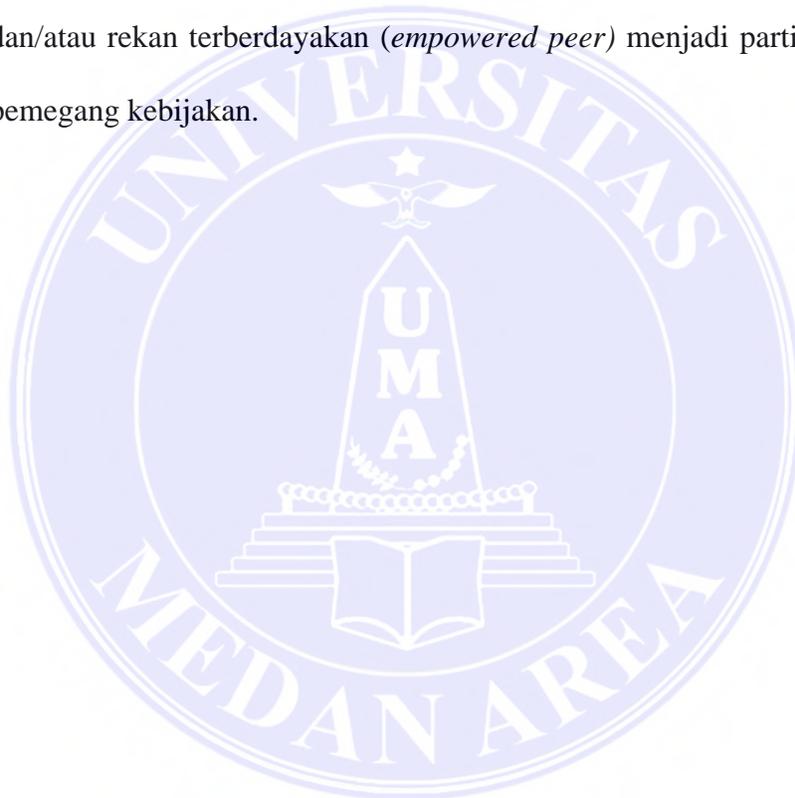
Disabilitas (*disability*) atau cacat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu jangka lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan. Hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Pada hakikatnya, istilah sebutan yang penulis paparkan diatas secara esensial maknanya sama. Perubahan berbagai istilah penyebutan terhadap penyandang disabilitas yang diusung oleh para akademisi, kalangan LSM, Orsos atau Ormas, dan para birokrat itu merupakan proses pergeseran dari paradigma lama ke paradigma baru, hal ini bertujuan untuk memperhalus kata sebutan dan mengangkat harkat serta martabat penyandang disabilitas, karena makna dari istilah sebutan tersebut berpengaruh terhadap asumsi, cara pandang, dan pola pikir seseorang terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, jika diklasifikasikan, pergeseran istilah-istilah penyebutan dan pendekatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Istilah penyebutan penyandang disabilitas

	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Istilah sebutan yang digunakan	penyandang cacat	Difabel, penyandang ketunaan, anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas
Model pendekatan	<i>Medical model, Tradisional model, Individual model</i>	<i>Sosial model</i>
Sifat pendekatan	<i>Charity</i> (belas kasihan)	Hak asasi (<i>Human Rihts-Approach</i>).

Sumber : Skripsi Suhailah Hayati Tahun 2019

Istilah sebutan model pendekatan, dan pendekatan, dan sifat pendekatan terhadap disabilitas seperti terlihat pada tabel diatas, telah menggambarkan pergeseran posisi dan perkembangan peran penyandang disabilitas lama dilihat sebagai obyek, selalu diintervensi, menjadi pasien, penerima bantuan, dan sebagai subyek penelitian. Sedangkan paradigm baru penyandang disabilitas baru dapat dilihat dari sebagai pemakai pelanggan dan/atau rekan terberdayakan (*empowered peer*) menjadi partisipan riset, dan pemegang kebijakan.



Tabel 2.2
Penelitian Relevan

No	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1.	Penelitian jurnal Suhailah Hayati (2019). “Peranan Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Kota Binjai”	Fokus Penelitian Lokasi Penelitian Penggunaan teori	Sama-sama meneliti tentang bagaimana peran dinas sosial terhadap penyandang disabilitas
2.	Penelitian Jurnal Miratun Hayati, Deden Sumpena, Encep Taufik rahman (2017). Dalam penelitiannya yang berjudul “peranan Dinas Sosial dalam Menanggulangi Kesejahteraan Sosial”.	Fokus Penelitian Lokasi Penelitian Penggunaan teori	Sama-sama meneliti tentang peran dinas sosial dalam mananggulangi kesejahteraan sosial
3	Penelitian jurnal Darman Ardiansyah (2015). Dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Dalam Meningkatkan Kesejahteraan sosial Penyandang cacat Di Provinsi Kepulauan Riau”	Fokus Penelitian Lokasi Penelitian Penggunaan teori	Sama-sama meneliti tentang peran dinas sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial

2.2 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas dengan menjabarkan fenomena yang terjadi di lapangan dengan menggunakan teori S. Sihombing (2001 : 172) yang memiliki lima indikator peran yaitu:

1. Sebagai Fasilitator

Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam berdiskusi serta dapat memecahkan masalah secara bersama-sama.

2. Sebagai pelayan masyarakat

Melayani masyarakat merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal.

3. Sebagai pendamping

Sebagai pendamping mereka yang telah dilatih untuk dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat dalam memerankan diri sebagai masyarakat

4. Sebagai Mitra

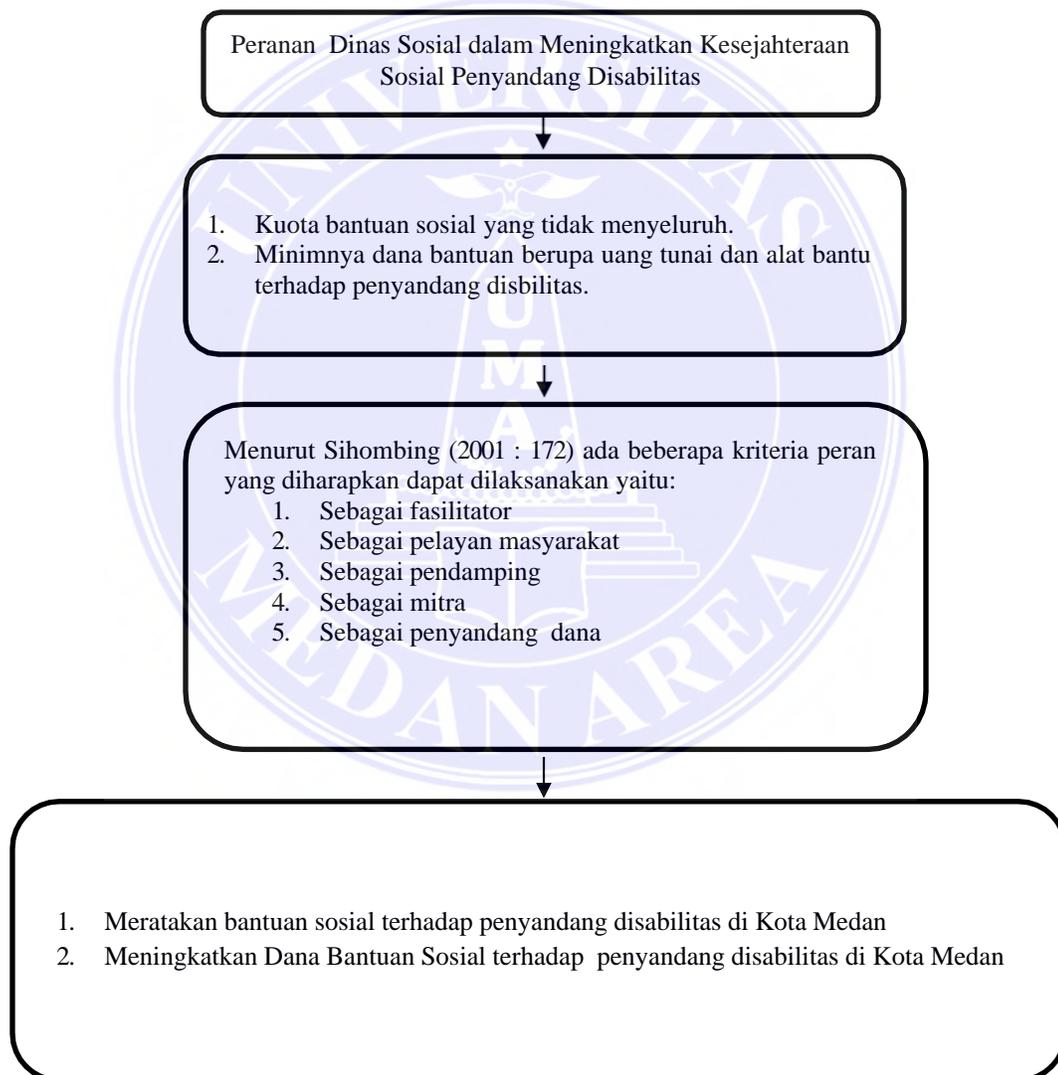
Konsep pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, maka masyarakat harus dianggap sebagai mitra.

5. Sebagai penyandang dana

Sebagai penyandang dana, Dinas sosial memberikan bantuan baik material maupun non material.

Adapun kerangka berfikir yang digambarkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara dalam melakukan penelitian secara ilmiah, metode penelitian digunakan ketika melakukan penelitian pada saat penyusunan skripsi dan penelitian ilmiah lainnya.

Menurut *Ericsson* (1968) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan merupakan.

Menurut *Kirk & Miller* (1986:9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertetu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Hal tersebut mengidentifikasi hal-hal yang relevan dengan makna baik dalam baik dalam beragamnya keadaan dunia keberagaman manusia, beragam tindakan, beragam kepercayaan, dan minat dengan berfokus pada perbedaan bentuk-bentuk hal yang menimbulkan perbedaan makna.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Yang mencoba mengungkapkan dan menggambarkan Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas di Kota Medan.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat, menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Dengan menetapkan fokus pada masalah yang akan diteliti

diharapkan nantinya penelitian akan mendapat data yang maksimal untuk menggambarkan fenomena aktual yang terjadi.

3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan penelitian tersebut di Dinas Sosial Kota Medan, yang beralamat di Jalan Pinang Baris/Jalan T.B Simatupang (Belakang Terminal Pinang Baris No. 114 B Medan).

3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Jadwal dan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2021		2022		
		Okt-Nov	Des	Jan-Mar	Apr	Juni-Juli
1	Penyusunan dan bimbingan proposal					
2	Seminar proposal					
3	Pengambilan data survey					
4	Pengumpulan data					
5	Seminar hasil					
6	Penyelesaian dan bimbingan skripsi					
7	Pengajuan sidang meja hijau					
8	Sidang meja hijau					

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek yang diteliti, dalam penelitian kualitatif informan terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki seutuhnya informasi mengenai masalah yang diangkat oleh peneliti, informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi atau fenomena pada masyarakat tetapi juga mengetahui tentang informan utama, informan kunci pada penelitian ini adalah 1 staff yaitu Bapak Fahrul Rozi Pane, S.Sos., M.H selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Medan.

2. Informan Utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan menyeluruh tentang masalah penelitian yang akan dipelajari, pada penelitian ini informan utama adalah 1 staff yaitu Bapak Lamo Mayjend Lbn Tobing selaku Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial

3. Informan Tambahan.

3 penyandang disabilitas yaitu Ibu Jahria, Ibu Nilawati dan Bapak Edi Saputra.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data terkait permasalahan yang diteliti, pada penelitian ini peneliti ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian kemudian mencatat yang ditemukan dilapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan untuk berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan maka dalam suatu topik tertentu, wawancara merupakan bentuk komunikasi antara penelitian dengan subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam mencari informan berdasarkan tujuan, menurut *esterbeg* dalam sugiyono (2013:231).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa (*field note*) yang sudah berlalu dan teknik pengambilan data ini menggunakan beberapa perangkat seperti kamera, dan perekam video. Dokumen dapat berupa gambar, tulisan, atau karya-karya yang monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

3.5. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman Sugiyono (2012:92) mengemukakan terdapat 3 langkah dalam menganalisis data, yaitu data, *display* data, dan verifikasi data.

1. Reduksi Data

Reduksi dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

2. Data *Display* (penyajian data)

Setelah direduksi, selanjutnya dilakukan penyajian data agar peneliti tidak tenggelam dalam kumpulan data, melalui penyajian data maka data akan terorganisasikan tersusun dengan pola hubungan sehingga data dipahami dengan mudah.

3. Klarifikasi Data (penarikan kesimpulan dan klarifikasi)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal apabila didukung oleh bukti yang jelas dan akurat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dinas Sosial sendiri sebagai dinas yang menaungi masalah sosial salah satunya Penyandang Disabilitas. Dinas Sosial Kota Medan sendiri mempunyai program untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas. Adapun program dari Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas Kota Medan ini adalah program pemberian bantuan, pemberian alat bantu dan bantuan tunai. Masyarakat penyandang disabilitas sudah sejahtera karena dinas sosial sendiri sudah memberikan bantuan yang penyandang tersebut didukung sangat bermanfaat bagi penyandang disabilitas tersebut. Dinas Sosial yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial sudah baik dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat terutama terhadap para penyandang disabilitas di Kota Medan ini. Dinas sosial sendiri mempunyai pendamping untuk para penyandang disabilitas, Pendamping itu sendiri adalah seseorang yang bertugas untuk mendampingi, pendamping diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh kementrian sosial dan/atau Dinas Sosial di Provinsi dan/atau Kabupaten/ jangka waktu tertentu untuk melakukan pendampingan pelaksanaan program bantuan. Pendamping penyandang disabilitas sendiri berguna untuk mengecek jalannya bantuan yang diterima. Dinas Sosial sebagai mitra sudah bekerja dengan baik dikarenakan penyandang disabilitas juga sudah merasakan kinerja dinas sosial dalam meningkatkan kesejahteraan dan

memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas itu sendiri Dan untuk bantuan dana Dinas Sosial sudah memberikan yang terbaik hanya saja anggaran dari kementerian pusat yang belum memadai.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti tuangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Agar Pemerintah pusat melalui Dinas Sosial dapat memberikan bantuan yang menyeluruh terhadap penyandang disabilitas di Kota Medan.
- b. Agar Kementrian Pusat dan Dinas Sosial lebih meningkatkan bantuan dana yang diberikan kepada penyandnag disabilitas di kota Medan.
- c. Agar Dinas Sosial lebih meningkatkan Program dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggito, A. d. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Abdulsyani. (2012). *Sosiologi Skematik, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- E. St. Harahap, d. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka.
- Huda, M. (2009). *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Pustaka Belajar.
- Soekanto, S. (1997). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.
- Thoha, M. (2012). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT Rajagrafindo, Persada.

Jurnal/Skripsi:

- Ardiansyah, D. (2015). Peran Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014. *Universitas Maritim Raja Ali Haji*. Tanjungpinang.
- Hayati, M. (2017). Peranan Dinas Sosial dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, II (2), 40-59.
- Hayati, S. (2019). Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai. *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*. Medan.

- Husna, N. (2014). Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. *Jurnal Al-Bayan*, XX (29), 46-58.
- Murti, I. A. (2020). Makna Kesejahteraan Sosial Ekonomi bagi Para Penyandang Disabilitas di Desa Cibuyur, Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang. *Universitas Negeri Semarang*. Semarang.
- Rosmalinda. (2018). Pendampingan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Medan dan Binjai. *LWSA Conference Series*, I(1), 199-202.

Internet:

- Dinas Kesehatan*. (2018, Oktober 20). Retrieved November 8, 2021, from <https://www.dinkes.jogjapro.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-lebih-dekat-bagian-1>
- Dinas Sosial*. (2019-2020). Retrieved November 8, 2021, from <https://dissos.pemkomedan.go.id/home>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia*. (2021). Retrieved November 24, 2021, from <https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas#:~:text=Adapun%20berdasarkan%20data%20berjalan%20200,juta%20atau%20sekitar%20lima%20persen>
- Ansori, A. N. (2020, September 10). *Liputan6*. Retrieved November 24, 2021, from <https://m.liputan6.com/disabilitas/read/4351496/jumlah-penyandang-disabilitas-di-indonesia-menurut-kementerian-sosial>

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara informan penelitian di Dinas Sosial Kota

Medan :

a. Daftar Pertanyaan kepada pegawai Dinas Sosial Kota Medan

1. Apa saja program dinas sosial dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas di Kota Medan?
2. Bagaimana peran dinas sosial sebagai fasilitator bagi penyandang disabilitas di kota medan?
3. Bagaimana pelayanan dinas sosial terhadap penyandang disabilitas di Kota Medan?
4. Apakah fungsi dari pendamping dinas sosial terhadap penyandang disabilitas di Kota Medan?
5. Bagaimanakah yang dimaksud dengan mitra bagi para penyandang disabilitas di Kota Medan?
6. Bagaimana peran dinas sosial sebagai penyandang dana terhadap penyandang disabilitas di Kota Medan?

b. Daftar pertanyaan kepada penyandang disabilitas di Kota Medan

1. Apakah dinas sosial sebagai fasilitator sudah melakukan perannya dengan baik?
2. Apakah pelayanan yang dilakukan dinas sosial terhadap penyandang disabilitas sudah baik?

3. Bagaimanakah kinerja pendamping dinas sosial terhadap para penyandang disabilitas?
4. Apakah dinas sosial sudah menjadi mitra yang baik terhadap penyandang disabilitas?
5. Bagaimana menurut ibu dengan adanya bantuan tunai yang diberikan oleh dinas sosial?



LAMPIRAN

1. Dokumentasi



A. Dokumentasi dengan penyandang disabilitas di Kota Medan



B. Dokumentasi bersama Bapak Lamo M. Lbn Tobing selaku pengadministrasi rehabilitasi masalah sosial



C. Wawancara bersama Bapak Lamo M. Lbn Tobing selaku pengadministrasi rehabilitasi masalah sosial